

**PERAN UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK) PROGRAM DANA AMANAH
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DAPM) DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN WERU,
KABUPATEN SUKOHARJO**

Doni Mardiyanto, Sulisty, Giarti Slamet
STIA Asuh Mitra Solo, Indonesia
Email : hlc.donsmart@gmail.com

Abstract : *One of the government's efforts to alleviate poverty and improve people's welfare is through the Community Empowerment Trust Fund Program (DAPM). This program is a continuation of the PNPM MP program. The DAPM program is managed by the Sub-district Activity Management Unit (UPK), where the UPK manages revolving funds from the government to be utilized by the community. In order to find out how the role of the UPK DAPM in Weru District in improving the welfare of the community, a research was carried out in Weru District, Sukoharjo Regency. This study uses a qualitative method, namely research that seeks to describe the object under study based on the facts in the field. The data presented using primary data and secondary data through structured interviews, observation, and documentation related to this research, then the data analysis technique used in this study is descriptive qualitative analysis, namely the preparation of data to be explained and analyzed and carried out simultaneously with data collection. data. The use of data validity uses a data validity test with triangulation. The results of this study indicate that the role of the Activity Management Unit (UPK) of the Weru District DAPM in helping to improve the welfare of the community is very influential. Through this program, the community can develop their existing business potential so that they are more productive. Meanwhile, the UPK DAPM of Weru District in managing the revolving fund circulation from the government is still not optimal, so it needs to be increased in order to achieve the budget target that has been set.*

Keywords: *Welfare, DAPM, Empowerment, Community*

1. PENDAHULUAN

Masalah kemiskinan merupakan masalah yang mengglobal. Kemiskinan adalah salah satu hal masalah yang perlu ditangani secara serius. Karena dasar permasalahan kemiskinan yaitu kurang terpenuhi kebutuhan hidup. Disamping itu, kebutuhan dasar bersifat dinamis dari suatu periode ke periode yang lain, semakin maju suatu negara, kebutuhan dasar manusianya akan meningkat. Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang bersifat multidimensi, yang berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya dan aspek lainnya. Kemiskinan timbul karena ada sebagian daerah yang belum sepenuhnya ditangani, ada sebagian sektor yang harus menampung tenaga kerja secara berlebih dengan tingkat produktifitas yang rendah, dan ada pula sebagian masyarakat yang belum ikut serta dalam proses pembangunan sehingga belum dapat menikmati hasilnya secara memadai (Sumodiningrat, 1998:26).

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang sekarang menjadi Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) merupakan salah satu program pembangunan

yang berfungsi untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja ditingkat perdesaan dan perkotaan yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia. Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah pendekatan yang memberikan kesempatan, wewenang yang lebih besar kepada masyarakat terutama masyarakat lokal untuk mengelola proses pembangunan. Program Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) merupakan Program lanjutan untuk mengelola aset berupa dana bergulir di masyarakat sebagai warisan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan atau yang lebih dikenal dengan PNPM Mandiri Perdesaan Kegiatan. Program dari DAPM tersebut berupa Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP), Usaha Ekonomi Produktif (UEP), dan program bantuan berupa pembagian sembako gratis, program pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), dan pembuatan jamban disetiap desa.

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) adalah unit yang mengelola operasional kegiatan UPK DAPM/PNPM MPd Pelestarian di kecamatan termasuk mengkoordinasikan pertemuan-pertemuan di kecamatan. Pengurus UPK terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan seksi pemberdayaan. Pengurus UPK berasal dari anggota masyarakat yang diajukan dan dipilih berdasarkan hasil Musyawarah Antar Desa (MAD). UPK mendapatkan penugasan BKAD untuk menjalankan tugas pengelolaan dana program dan tugas pengelolaan dana perguliran. Seiring dengan berhentinya dana BLM PNPM Md maka tugas dan tanggungjawab UPK Tetap melaksanakan Dana Perguliran PNPM Pelestarian / DAPM. Unit Pengelola Kegiatan - Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (UPK DAPM) berawal dari terpilihnya Kecamatan Weru sebagai lokasi *Pilot Project* Program Pemberdayaan Masyarakat sejak tahun 1998 dengan nama KDF (Kecamatan Development Found), kemudian tahun 1999 Program ini berubah nama menjadi PPK (Program Pengembangan Kecamatan) hingga tahun 2001. Kecamatan Weru sempat terhenti selama 6 tahun tidak mendapatkan kucuran dana BLM. Kemudian Tahun 2007 kembali mendapatkan Dana BLM dengan nama PNPM – PPK (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan – Program Pengembangan Kecamatan). Pada tahun 2008 kembali mendapatkan dana BLM dengan nama PNPM – MD (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Mandiri Perdesaan) hingga tahun 2014. Memasuki tahun 2015 Dana BLM PNPM MD secara nasional dihentikan. Setelah dana BLM PNPM Md berhenti maka sesuai petunjuk surat edaran Menko Kesra Nomor : 817 / Menko Kesra / I / 2014 tanggal 31 Januari 2014 perihal Pengelola Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM), maka UPK PNPM Md berubah nama menjadi UPK DAPM berdasarkan surat keputusan Kemenkumham Nomor : AHU-0004.AH.01.07 Tahun 2017 tentang pengesahan pendirian Badan Hukum Perkumpulan DAPM Kecamatan Weru tanggal 23 Januari 2017.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang Peran Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo.

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Dalam hal ini peneliti ingin melihat sejauh mana pelaksanaan peran UPK DAPM Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Data-data diperoleh dari lapangan berupa kata-kata, gambar baik itu dari hasil wawancara, dokumentasi maupun observasi dan bukan berupa angka. Menurut Sugiono (2008)

mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana penelitian adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan).

Prosedur Pengumpulan dan Analisis Data

Untuk mendukung penelitian ini data diperoleh melalui sebagai berikut: Observasi, teknik ini digunakan untuk mengamati secara langsung kegiatan yang sedang dilaksanakan, dimana peneliti disini tidak hanya sebagai peneliti tetapi juga sudah merupakan bagian objek penelitian; Wawancara, dalam teknik ini digunakan untuk mewawancarai secara langsung kepada UPK dan masyarakat pelaksanaan kegiatan DAPM yang ada hubungannya dengan objek sasaran penelitian ini; dokumentasi, penelitian mengamati secara langsung kegiatan-kegiatan yang sedang dilaksanakan untuk mengambil data yang autentik dengan metode pengambilan gambar dan data-data tertulis untuk mendukung keakuratan data dimaksud. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yakni penyusunan data untuk kemudian dijelaskan dan dianalisis serta dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data. Analisis deskriptif ini dimaksudkan untuk menemukan dan mendeskripsikan implementasi kebijakan tata tertib. Penelitian ini mendeskripsikan dan menginterpretasikan secara faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada. Proses pengolahannya mengikuti teori Miles dan Huberman (Sugiyono 2011), proses pengolahan data melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data (data display) dan verifikasi/penarikan kesimpulan.

3. HASIL PENELITIAN

Gambaran Umum Lokasi

Kecamatan Weru merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Sukoharjo, tepatnya di Jalan Kapten Pattimura, Ngreco. Lokasinya sangat dekat dengan kantor Kecamatan Weru dan Pasar Tawang Lama (pusat pasar Kecamatan Weru). Secara geografis berada pada ketinggian 116 M di atas permukaan laut, sebagian besar wilayahnya berada di dataran tinggi/ perbukitan. Kecamatan Weru terdiri dari 13 Desa/ Kelurahan dan menempati wilayah seluas 41,98 km². Batas-batas Kecamatan Weru yakni: sebelah utara: Kecamatan Tawang Sari, Sebelah Timur: Kecamatan Bulu, sebelah barat: Kecamatan Cawas Klaten, sebelah selatan: Kecamatan Semin Gunung Kidul, Yogyakarta.

Hasil Penelitian

Fokus penelitian ini adalah peran Unit Pengelola Kegiatan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (UPK DAPM) Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa UPK DAPM Kecamatan Weru memiliki peran yang besar dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam upaya penyediaan dana untuk modal usaha. Sebagaimana data dari hasil wawancara:

“Maksud program DAPM memberdayakan masyarakat agar memiliki penghasilan di rumah atau di desa. Tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan, serta membantu masyarakat yang kesulitan dana untuk usaha”. (WW, SW, 31-03- 2021).

Lebih lanjut peneliti juga menanyakan tentang upaya UPK dalam mensosialisasikan program kepada masyarakat, diperoleh jawaban sebagai berikut:

“Upaya UPK dalam mensosialisasikan program yaitu melalui berbagai kegiatan atau forum rapat maupun musyawarah baik desa maupun kecamatan termasuk kerjasama dengan kepala desa, juga melalui pelatihan dan pembinaan kelompok pengakses”.
(WW, SW, 31-03- 2021).

Dengan sosialisasi yang baik tentunya akan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk dapat mengakses dan memanfaatkan program DAPM, sehingga peran UPK akan semakin nampak dan luas dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adanya dana bantuan pinjaman modal usaha memberikan kesempatan pada kelompok penerima manfaat menjadi lebih produktif dan usahanya dapat terus berjalan, sehingga memberikan dampak peningkatan ekonomi warga. Masyarakat sangat mengapresiasi dan menunjukkan respon yang baik dengan adanya program DAPM dan terbantu untuk mengembangkan usahanya. Sebagaimana data hasil wawancara dari salah seorang penerima manfaat:

“Kami sangat terbantu dengan dana dari UPK DAPM untuk menambah modal usaha kuliner warung makan kami, dan Alhamdulillah usaha terus berjalan sampai sekarang”.
(WW, PK, 03-04-2021).

Selanjutnya peneliti juga menanyakan bagaimana cara masyarakat agar dapat mengakses dana pinjaman atau bantuan modal tersebut. Mengingat dalam proses untuk mendapatkan dana terdapat aturan yang telah ditetapkan UPK yang harus dipenuhi. Kemudian diperoleh jawaban:

“Untuk mengakses dana dari UPK DAPM, masyarakat harus membentuk kelompok yang anggotanya minimal 5 (lima) orang, kemudian membuat ajukan dengan mengisi proposal yang telah disiapkan UPK”.
(WW, SW, 31-03- 2021).

Ini menunjukkan bahwa dalam proses pengajuan pinjaman baik untuk sektor usaha ekonomi produktif maupun simpan pinjam perempuan, para warga pengakses diharuskan untuk membentuk kelompok minimal 5 (lima) orang dan kemudian melakukan pengajuan ke kantor UPK dengan mengisi proposal.

Dalam upaya membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tugas dan sumbangsih UPK DAPM kepada masyarakat tidak hanya pada bantuan pinjaman modal usaha, masih banyak program lain yang telah dilaksanakan, antara lain; 1) memberikan pendampingan dan pelatihan baik pengelolaan usaha, administrasi kelompok maupun pelatihan kemandirian, 2) memberikan bantuan hewan ternak kambing kepada Rumah Tangga Miskin (RTM), 3) memberikan bantuan sembako kepada RTM. Sebagaimana data hasil wawancara:

“Sumbangsih UPK pada masyarakat meliputi menyediakan pinjaman dana usaha, memberikan pendampingan dan pelatihan, baik pengelolaan usaha, administrasi kelompok maupun pelatihan kemandirian. Kemudian Memberikan bantuan hewan ternak kambing kepada Rumah Tangga Miskin (RTM) dan memberikan bantuan sembako kepada RTM”. (WW, SW, 31-03-2021).

UPK DAPM pada dasarnya fokus mengelola dana bergulir yang diberikan oleh pemerintah untuk masyarakat. Ada dua sektor pemanfaatan dana tersebut, yakni Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP). Data UPK Kecamatan Weru

menunjukkan untuk sektor UEP ada 214 kelompok pengakses/ pemanfaat dan sektor SPP ada 71 kelompok dengan jumlah rumah tangga miskin (RTM) sebanyak 1.111 RTM. Hingga per Desember 2020 tersedia target dana bergulir untuk sektor UEP sebesar Rp.8.900.000.000,- (delapan milyar sembilan ratus juta rupiah), dan terealisasi Rp.5.997.000.000,- (lima milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) atau persentase perguliran sekitar 67%. Sedangkan untuk sektor SPP tersedia target dana sebesar Rp. 4.900.000.000,- (empat milyar sembilan ratus juta rupiah), dan terealisasi Rp. 2.756.700.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) atau persentase perguliran sekitar 56%. Di samping itu UPK juga mencatatkan keuntungan bersih sebesar Rp. 851.609.423,-. Ini menjadi catatan sendiri bahwa penyerapan dana bergulir masih belum maksimal dan mencapai target. Perlu upaya peningkatan sosialisasi secara masif kepada masyarakat agar ikut mengakses dana tersebut dan penerima manfaat menjadi lebih banyak. Sementara itu, indikator besar kecilnya laba bersih yang diperoleh juga mempengaruhi besarnya peran UPK DAPM itu sendiri, karena dengan keuntungan yang besar, dapat digunakan kembali untuk akses pendanaan dan bantuan yang lebih besar kepada masyarakat. Berikut pembagian persentase keuntungan yang diperoleh dan yang akan dapat dialokasikan kembali digambarkan sebagai berikut:

Tabel 1: Laporan Evaluasi Akhir Tahun 2020 UPK DAPM

NO	URAIAN	PERSENTASE
1	Surplus yang bisa dimanfaatkan	100%
2	Alokasi Pemanfaatan surplus :	
	2.1 Tambah Modal	60%
	2.2 Laba Bersih yang bisa dibagi	40%
	2.2.1 Pemberdayaan RTM/Miskin absolut	40%
	2.2.2 Kelembagaan	45%
	2.2.3 Pembinaan	15%

Upaya UPK DAPM dalam menjalankan perannya membantu meningkatkan kesejahteraan warga melalui program pinjaman modal usaha juga mengalami hambatan yang dapat mempengaruhi lambatnya aliran dana, yakni adanya tunggakan pinjaman yang cukup tinggi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, UPK melakukan beberapa cara antara lain: 1) Penerbitan Surat Tagihan kepada kelompok dan tembusan Rekap Tunggakan kepada Kepala Desa, 2) Penagihan dilakukan oleh UPK, PL Perguliran dan didampingi oleh FK Pelestarian maupun Tim DAPM Kecamatan Weru, 3) Pemanggilan kelompok ke Kantor UPK, 4) Kunjungan ke rumah pengurus dan anggota kelompok, 5) Pembuatan surat pernyataan sanggup mengembalikan pinjaman.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang peran Unit Pengelola Kegiatan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (UPK DAPM) terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Peran UPK DAPM Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo sangat besar dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam pemberian pinjaman modal usaha bagi masyarakat menengah ke bawah. Hal ini dapat dilihat dari eksistensi usaha yang dijalankan masyarakat (pengakses dana).
- 2) UPK DAPM Kecamatan Weru sebagai pengelola dana bergulir pemerintah sudah menjalankan berbagai program untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang meliputi:

menyediakan pinjaman dana usaha, memberikan pendampingan dan pelatihan, baik pengelolaan usaha, administrasi kelompok maupun pelatihan kemandirian dan kemudian Memberikan bantuan hewan ternak kambing kepada Rumah Tangga Miskin (RTM) serta memberikan bantuan sembako kepada RTM.

- 3) UPK DAPM Kecamatan Weru sebagai pengelola dana bergulir pemerintah ditemukan bahwa penyerapan dana bergulir masih belum maksimal dan masih ada permasalahan tunggakan pinjaman yang cukup tinggi.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka disarankan sebagai berikut:

- 1) UPK DAPM Kecamatan Weru harus lebih aktif dalam memberikan informasi atau sosialisasi program DAPM agar banyak masyarakat yang mengetahui dan mengaksesnya. Peran aktif masyarakat juga perlu dilibatkan dalam membantu memberikan dorongan kepada masyarakat lain melalui tindakan-tindakan yang positif.
- 2) Berbagai program UPK DAPM dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang sudah dijalankan untuk terus dipertahankan dan ditingkatkan setiap tahunnya. Sehingga perannya dalam masyarakat dapat terus meningkat dan semakin dirasakan oleh masyarakat lebih luas di Kecamatan Weru.
- 3) Agar dana bergulir UPK tetap tersedia dan meningkat, perlu adanya penataan kelembagaan yang disesuaikan dengan kultur sosial, budaya, ekonomi dan kearifan lokal dengan tetap berdasar pada rohnya UPK DAPM.
- 4) Masyarakat khususnya penerima manfaat harus lebih aktif dan dapat bekerja sama yang baik untuk menghindari permasalahan adanya tunggakan pinjaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2000. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Damsar dan Indrayani. 2016. *Pengantar Sosiologi Perdesaan*, Jakarta : Kencana.
- J Moleong, Lexy. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda.
- Laporan Evaluasi Akhir Tahun UPK DAPM Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020.
- Soetomo. 2008. *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2009. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sumodiningrat, Gunawan. 1998. *Membangun Perekonomian Rakyat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sinaga Marlina. 2018. *Peranan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir*. Skripsi. Medan: Program Studi Administrasi Publik, FISIP Universita Medan Area.
- Tim Koordinasi PNPM Mandiri Pedesaan. 2009. *Petunjuk Teknik Optimalisasi Tahapan Kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan PNPM-MP*.

- Umay, Fati Laeni. 2019. *Peningkatan Status Sosial Ekonomi Masyarakat Melalui Program Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) di Desa Pekuncen Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas*. Skripsi. IAIN Purwokerto.
- Widya Kurniati dkk. 2017. *Peran Masyarakat dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di Desa Bulontio Barat, Kecamatan Sumalata*. Gorontalo: Jurnal Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Gorontalo.